

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Isu energi merupakan salah satu isu yang intens dibicarakan dalam hubungan internasional kontemporer. Ketahanan energi dianggap penting karena energi merupakan komponen penting dalam produksi barang dan jasa. Segala bentuk gangguan yang dapat menghambat ketersediaan pasokan energi dalam bentuk bahan bakar primer (BBM, gas dan batubara), maupun kelistrikan dapat menurunkan produktivitas ekonomi suatu wilayah dan jika luasnya gangguan sampai pada tingkat nasional dapat membuat target pertumbuhan ekonomi meleset dari yang ditetapkan. Oleh sebab itu menjaga ketersediaan energi menjadi agenda penting bagi setiap negara di dunia, termasuk Indonesia.

Tingkat populasi dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, membuat konsumsi energi Indonesia yang masih bergantung terhadap energi fosil terus meningkat. Sementara itu ketersediaan energi fosil semakin terbatas, sehingga diperlukannya penganekaragaman sumberdaya energi agar ketersediaan energi terjamin. Perpres No. 5 tahun 2006 dan UU No. 30 tahun 2007 mendorong arah Kebijakan Energi Nasional untuk mengurangi pemakaian bahan bakar fosil dan mengembangkan energi terbarukan sebagai bauran energi (*energy mix*).

Dalam optimalisasi *energy mix* ini, kemudian Indonesia juga menjalin kerjasama dengan IEA. IEA menjalankan promosi kerjasama internasional mengenai teknologi energi dan membantu dalam penggabungan antara kebijakan lingkungan dengan kebijakan energi yang rasional. Oleh karena itu penelitian ini

menggali tentang sejauh mana kontribusi dan pengaruh kerjasama Indonesia – IEA terhadap optimalisasi *energy mix* di Indonesia.

Penelitian ini menemukan bahwa, dari kelima dampak interaksi menurut Keohane dan Nye yaitu, perubahan perilaku, pluralisme internasional, meningkatnya hubungan depedensi dan interdepedensi antar negara, meningkatnya kemampuan suatu negara untuk mempengaruhi negara lain, dan munculnya *autonomous actors* dalam menentukan kebijakan luar negeri, terdapat tiga dampak yang sesuai dengan fokus penelitian. Ketiga dampak tersebut ialah, pluralisme internasional yang terlihat dari rekomendasi IEA dalam analisis kebijakan energi Indonesia, perubahan perilaku yang ditandai dengan penetapan dan perubahan kebijakan, dan meningkatnya hubungan interdepedensi yang terlihat dari peningkatan hubungan kerjasama.

Salah satu hasil kerjasama Indonesia – IEA berupa *Indonesia Indepth Energy Policy Review (IIEPR)*, yang juga dinilai sebagai keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama tersebut, membawa pengaruh terhadap beberapa perubahan kebijakan dalam pengoptimalisasian *energy mix*. Laporan analisis tersebut berisikan kritikan dan rekomendasi dari IEA yang kemudian beberapa diantaranya ditetapkan pemerintah dalam bentuk regulasi. Analisis atas kebijakan energi pemerintah Indonesia telah dilakukan sebanyak dua kali, yaitu pada tahun 2008 dan 2015.

IEA mengkonfirmasi beberapa kemajuan substansial pada laporan analisis yang kedua di tahun 2015. Menurut IEA Indonesia telah memulai proses perubahan dan telah berhasil melaksanakan beberapa perubahan penting, yang

sejalan dengan rekomendasi IEA di tahun 2008. Kemudian dari regulasi-regulasi yang ditetapkan tersebut membawa dampak terhadap bauran energi nasional, di tahun 2016 terdapat peningkatan penggunaan EBT sebagai bauran energi primer. Peningkatannya tidak begitu signifikan, karena dalam pengembangan EBT tidaklah mudah, permasalahan seperti biaya, teknologi, akses dan hal lainnya sering menjadi kendala. Namun, peningkatan ini akan sangat membantu pemenuhan konsumsi energi domestik dalam bauran energi nasional, mengurangi ketergantungan terhadap energi minyak, juga menjaga keberagaman energi itu sendiri. Penganekragaman energi dinilai bukan lagi sebagai pilihan tapi sebuah keharusan.

5.2 Saran

Langkah Indonesia menjalin kerjasama dengan IEA dan meningkatkan kerangka kelembagaan dengan membuat Unit Kebijakan dan Perencanaan dalam Dewan Energi Nasional (DEN) dan Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) di lingkungan KESDM, merupakan langkah penting dalam membantu penyusunan perencanaan energi nasional yang lebih terarah. Masuknya Indonesia ke IEA pada tahun 2015 dapat memperkuat kerjasama, pemerintah juga harus memperhatikan regulasi-regulasi yang diterapkan merupakan prioritas utama dalam menjaga ketersediaan energi.

Pemerintah Indonesia perlu meningkatkan koordinasi dalam penyusunan peraturan dan kebijakan energi, untuk meminimalisir hambatan-hambatan dalam optimalisasi *energy mix* seperti, tumpang tindih peraturan, ketidakpastian hukum, investasi, dan hal lainnya. Penelitian ini hanya membahas kerjasama Indonesia – IEA dalam optimalisasi *energy mix*, sehingga membuka peluang bagi penelitian

lanjutan yang lainnya. Penelitian tersebut bisa saja berupa bahasan tentang energi bersih yang juga merupakan salah satu fokus permasalahan energi dalam menjaga polusi. Bergabungnya Indonesia ke dalam IEA dapat mempermudah penelitian lanjutan, dengan program kerangka kerjasama yang berkelanjutan dan diulas secara berkala.

